

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 1 dari 36

### IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan untuk terus melakukan peningkatan efektivitas, efisiensi serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang good governance dan clean government, sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara integral, sistematis dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut disusunlah Sistem AKIP yang pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagai bagian dari Sistem AKIP, maka Inspektorat menentukan Sasaran Utama yaitu Meningkatkan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) melalui pemerintahan yang bersih ( Clean Government ) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di BATAN. Langkah kongkrit yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut antara lain menetapkan Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi, tersusunnya Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ), secara rutin melaksanakan pemeriksaan operasional, evaluasi LAKIP dan Reviu Laporan Keuangan, serta pemantauan tindak lanjut pemeriksaan internal maupun eksternal dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten.

Selain itu untuk mengikuti perkembangan teknologi pengawasan, maka Inspektorat telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan ( SIMWAS ) yang bertujuan dapat membantu auditor dan pemangku kepentingan ( Eselon 1 ) yang terkait bidang

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 2 dari 36

pengawasan. Diharapkan melalui beberapa langkah kongkrit tersebut dapat meningkatkan kinerja unit kerja dan tetap mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diperoleh sejak tahun 2009 serta mempertahankan dan meningkatkan capaian LAKIP BATAN tahun 2011 yang telah memperoleh predikat B.

LAKIP Inspektorat Tahun 2012 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam bidang pemeriksaan dan pengawasan. Capaian kinerja Inspektorat secara umum dapat tercapai secara maksimal baik itu dari segi program, kegiatan maupun dari ketatausahaan serta pendanaan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat tahun 2012 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kendala pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat di tahun yang akan datang.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 3 dari 36

Secara garis besar pencapaian sasaran tahun 2012 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Capaian sasaran Inspektorat tahun 2012 :

Sasaran Utama	No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) melalui pemerintahan yang bersih ( <i>Clean Government</i> ) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di BATAN	1	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	3 ( tiga ) Unit Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK	5 ( lima ) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK	167%	Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK berdasarkan SK Kepala BATAN
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN	90 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal	100 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal	111,11%	Dari 93 temuan eksternal maupun internal telah ditindaklanjuti seluruhnya.
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 10%	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5.38%	146,2%	Dari 93 temuan hasil pemeriksaan, hanya terdapat 5 temuan yang berindikasi kerugian negara

Berbagai capaian di atas menjadi bagian dari pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat BATAN . Untuk melaksanakan program kerjanya, Inspektorat didukung oleh anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan. Anggaran (DIPA) tahun 2012. Inspektorat BATAN untuk tahun 2012 memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 4.762.470.000,- milyar, Realisasi belanja Inspektorat tahun 2012 sebesar Rp 4.544.632.376,-, atau mencapai 95,43 %.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 4 dari 36

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Inti dari LAKIP adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Inspektorat BATAN merupakan Unit Organisasi Eselon II berada di bawah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. Penjabaran lebih lanjut khususnya mengenai Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Inspektorat diatur dalam Keputusan Kepala BATAN Nomor : 392/KA/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN.

Lakip Inspektorat ini disusun untuk menindaklanjuti beberapa ketentuan yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala BATAN Nomor 131/KA/VI/2011 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, Eselon I dan Eselon II di Badan Tenaga Nuklir Nasional.

#### 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BATAN.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 5 dari 36

2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan per Undang-Undang yang berlaku.
3. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

### 1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BATAN Nomor : 392/KA/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 Inspektorat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

### 1.4 Sumber Daya Manusia ( Jumlah Pegawai )

Jumlah pegawai Inspektorat BATAN sampai dengan akhir Desember 2012 berjumlah 23 orang. Keadaan pegawai Inspektorat berdasarkan kelompok jabatannya disajikan pada Tabel di bawah :

#### Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Menurut jabatan :		
	Eselon II	1	
	Eselon IV	1	
	Fungsional	17	
	Staf	4	
II	Menurut Golongan :		
	Golongan IV	4	
	Golongan III	18	
	Golongan II	1	
III	Menurut Pendidikan:		
	S1	13	
	D3	4	
	SLTA	6	
IV	Jabatan Fungsional		
	Auditor Ahli Madya	3	

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 6 dari 36

	Auditor Ahli Muda	4	
	Auditor Ahli Pertama	4	
	Auditor Penyelia	3	
	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	
	Auditor Pelaksana	1	
	Jumlah Total	23	

- Pengembangan Personil  
Dalam rangka pengembangan SDM, peran Auditor berdasarkan diklat dari BPKP ditetapkan sebagai berikut :
  - Pengendali Mutu 1 orang,
  - Pengendali Teknis 2 orang,
  - Ketua Tim 4 orang,
  - Anggota Tim 8 orang,
- Pada tahun 2012 telah dilaksanakan beberapa diklat dan seminar yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai Inspektorat.

### 1.5 Kelembagaan dan Sistem Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas pokok pengawasan, dilaksanakan review dan penyempurnaan manual audit yang materinya berupa kebijakan dan prosedur pengawasan yang meliputi :

- Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Khusus.
- Pelaksanaan Evaluasi LAKIP dan Reviu Laporan Keuangan.
- Pelaksanaan Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi.
- Penyusunan PKPT, PKA, KKA dan LHA.
- Penyusunan tim pemeriksa.
- Pembinaan disiplin PNS di Inspektorat.
- Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan ( tindak lanjut ).
- Pelaksanaan pemutakhiran data.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : :
		Tanggal : :
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2011		Halaman : 7 dari 36

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Kinerja

##### 2.1.1 Visi

Dengan mencermati lingkungan yang berkembang dan tuntutan publik yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme , maka guna mendukung Program BATAN, Visi Inspektorat Tahun 2010 – 2014 yaitu:

*“ Menjadi Penjamin Mutu ( Quality Assurance ) yang Profesional dalam Mewujudkan Good Governance dan Bebas KKN “*

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Inspektorat. Disamping komitmen dan profesionalitas juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif, sehingga visi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai dan segenap stakeholder berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat sebagai unsur pengawas intern harus dapat bertindak sebagai Penjamin Mutu ( *quality assurance* ) yang menjamin proses dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di BATAN telah sesuai dengan kebijakan pimpinan, tidak menyimpang, dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 8 dari 36

### 2.1.2 Misi

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat mempunyai Misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. *Melaksanakan pemeriksaan secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong peningkatan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di BATAN.*
2. *Mendorong terwujudnya Auditor Inspektorat yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.*
3. *Mewujudkan Sistem Informasi Pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal.*
4. *Melaksanakan dan meningkatkan sistem mutu dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengelolaan administrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ).*

Keterkaitan antara visi dengan misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Misi pertama, kedua dan keempat menggambarkan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai Inspektorat dalam mewujudkan Good Governance melalui kegiatan pengawasan, penerapan sistem mutu yang baik dan pengelolaan administrasi dalam upaya mencegah dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyimpangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai ke tahap evaluasi, melalui efektivitas penjaminan mutu ( *Quality Assurance* ) pengawasan.
- b. Misi ketiga menggambarkan kesiapan seluruh pegawai Inspektorat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan ( SIMWAS ), yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tidak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan menggunakan SIMWAS diharapkan seluruh kegiatan pemeriksaan dapat terlaksana secara cepat, efektif dan sistematis.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 9 dari 36

### 2.1.3 Tujuan

Tujuan Inspektorat sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat 2010 – 2014 adalah :

*Memberikan pelayanan prima secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja optimal.*

### 2.1.4 Sasaran dan indikator kinerja.

Sasaran Strategis Inspektorat sesuai Rencana Strategis Inspektorat 2010 – 2014 adalah :

*Peningkatan kinerja Unit Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) melalui pemerintahan yang bersih ( Clean Government ) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di  
BATAN.*

Upaya meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik akan dilakukan melalui peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) secara berkelanjutan pada semua tingkat kegiatan, melibatkan berbagai pihak termasuk meningkatkan peran auditor serta Bagian Tata Usaha Inspektorat. Kemudian upaya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 10 dari 36

Indikator Kinerja Utama Inspektorat sesuai Rencana Strategis Inspektorat 2010 – 2014 adalah :

### Indikator Kinerja Utama Inspektorat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) melalui pemerintahan yang bersih ( Clean Government ) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) di BATAN	1	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN, target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 5 Unit Kerja
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN, target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 100 %.
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara, target sampai tahun 2014 sebanyak 0 %.

#### 2.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi BATAN, maka kebijakan dan strategi yang dipergunakan oleh Inspektorat adalah sebagai berikut:

##### 1. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Kebijakan pengawasan Inspektorat BATAN mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999, Inpres Nomor 4 tahun 2005 dan PP Nomor 60 tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.
- b. Kebijakan pelaksanaan pengawasan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/4/2005 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat.
- c. Kebijakan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercakup didalamnya mengenai Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi mengacu kepada Inpres Nomor 5 tahun 2004.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 11 dari 36

## 2. Strategi

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain :

- a. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengawasan dengan cara:
  - 1) Meningkatkan kemampuan pengawasan Inspektorat BATAN, yaitu:
    - a) Meningkatkan wawasan dan keterampilan auditor melalui pendidikan, kursus / pelatihan, ceramah, penataran dan sebagainya.
    - b) Melengkapi kekurangan tenaga Auditor secara bertahap dengan pengangkatan pegawai baru yang terseleksi.
    - c) Menyempurnakan organisasi dan tata laksana, serta mendorong terwujudnya standar kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat BATAN sesuai dengan Standar BATAN.
  - 2) Memprioritaskan Pemeriksaan Kinerja ( Performance Audit ), Pemeriksaan Keuangan, dan Pemeriksaan Akuntabilitas untuk menilai capaian kinerja unit kerja di BATAN secara menyeluruh / komprehensif.
  - 3) Menetapkan skala prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang keberhasilan program BATAN dan aspek pelayanan kepada masyarakat.
  - 4) Meningkatkan pemeriksaan investigasi dengan menerapkan Teknik Audit Investigasi, berdasarkan hasil pengembangan temuan pemeriksaan reguler maupun dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan wewenang, KKN dan penyimpangan lainnya.
  - 5) Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) lainnya.
- b. Meningkatkan ketersediaan anggaran melalui koordinasi dengan instansi lainnya yang berwenang di bidang pengawasan ( BPKP, MENPAN, APIP).
- c. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan dengan cara :
  - 1) Mewajibkan kepada masing – masing eselon II, selaku penanggung jawab program unit kerja untuk menyampaikan tanggapan/ penjelasan terhadap setiap laporan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat, maupun BPK/BPKP.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 12 dari 36

- 2) Melakukan pemantauan terus menerus terhadap kewajiban tersebut diatas, dan selanjutnya secara periodik dilaporkan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
- 3) Melakukan pengecekan setempat terhadap temuan hasil pemeriksaan yang dianggap penting, untuk mengetahui hambatan penyelesaian tindak lanjut atas saran serta mendorong kecepatan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran rekomendasi Inspektorat.

### 2.1.6 Program dan Kegiatan Inspektorat

Program Inspektorat sesuai dokumen RKAKL tahun 2012 adalah :

*Penerapan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BATAN*

Program yang dilaksanakan Inspektorat pada hakekatnya adalah penjabaran dari tugas pokok dan fungsi BATAN dengan ditunjang beberapa kegiatan, output, sub output dan komponen dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Program Inspektorat Tahun 2012 ( revisi )

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Output	Satuan	Sub Output	Tahapan / Komponen
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur	Peningkatan Kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) melalui pemerintahan yang bersih ( Clean Governance ) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di BATAN	1 Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di BATAN	Unit Kerja	Laporan wilayah bebas dari korupsi (WBK) di BATAN, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN serta berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.	Laporan	Peningkatan kinerja unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BATAN	Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi
		2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN	Laporan				Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP di Batan
		3 Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Laporan				Penilaian Kinerja Unit Kerja
						Peningkatan Akuntabilitas dan	Evaluasi Lakip dan Reviu Laporan Keuangan

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 13 dari 36

						Transparansi Kegiatan Kegiatan BATAN	Evaluasi dan Tindak Lanjut LHP BPK dan Inspektorat
				Laporan Layanan Perkantoran	Laporan	Dukungan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
							Pelayanan Publik Atau Birokrasi
							Pembayaran Gaji, Lembur dan Honorarium

## 2.2 Penetapan Kinerja tahun 2012

Penetapan kinerja merupakan janji kinerja serta komitmen untuk mencapai target kinerja tahunan yang disepakati antara pihak penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab kinerja.

Penetapan Kinerja Inspektorat pada tahun 2012 dijabarkan pada tabel dibawah ini :

### Penetapan Kinerja Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK ) di BATAN	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	3 Unit Kerja
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN	90%
	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	10%

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 14 dari 36

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Pengukuran Kinerja

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pengukuran Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

#### Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2012

Sasaran Utama	No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) melalui pemerintahan yang bersih ( <i>Clean Government</i> ) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di BATAN	1	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	3 ( tiga ) Unit Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK	5 ( lima ) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK	167%	Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK berdasarkan SK Kepala BATAN
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN	90 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal	100 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal	111,11%	Dari 93 temuan eksternal maupun internal telah ditindaklanjuti seluruhnya.
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 10%	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5,38%	146,2%	Dari 93 temuan hasil pemeriksaan, hanya terdapat 5 temuan yang berindikasi kerugian negara
<b>Indikator Kinerja Non IKU</b>						
	1	Jumlah dokumen audit kinerja terhadap unit kerja di BATAN	20 ( dua puluh ) dokumen hasil audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	20 ( dua puluh ) dokumen hasil audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	100%	11 laporan hasil audit kinerja dan Sisa 9 laporan sedang dalam proses penyusunan LHA.
	2	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan reviu Laporan Keuangan unit kerja di BATAN	1 ( satu ) dokumen evaluasi kinerja dan 2 dokumen reviu Laporan Keuangan di BATAN	1 ( satu ) dokumen evaluasi kinerja dan 2 dokumen reviu Laporan Keuangan di BATAN	100%	1 dokumen evaluasi LAKIP dan 1 dokumen reviu tahun 2012 dan 1 dokumen semester 1 tahun 2012
	3	Jumlah Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )	1 ( satu ) Pedoman SPIP di BATAN	1 ( satu ) Pedoman SPIP di BATAN	100%	Pedoman SPIP berdasarkan SK Kepala BATAN

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 15 dari 36

Metodologi pengukuran capaian kinerja Inspektorat pada tahun 2012 memperhatikan beberapa kriteria yaitu :

- a. Jumlah Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
- b. Jumlah laporan tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dan internal
- c. Jumlah Temuan yang berindikasi kerugian negara
- d. Jumlah Unit Kerja yang diaudit sesuai PKPT
- e. Jumlah Laporan Hasil Audit yang diterbitkan sesuai PKPT maupun diluar PKPT
- f. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Unit Kerja.

Berdasarkan data tersebut diatas, Inpektorat menganalisa dan kemudian diperoleh hasil pencapaian kinerja pada tahun 2012 sehingga dapat disajikan berupa jumlah unit kerja, laporan dan prosentase capaian.

### 3.2 Evaluasi Kinerja.

#### Perbandingan Realisasi IKU tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012

Sasaran Utama	No	Indikator	Realisasi tahun 2011	Realisasi tahun 2012
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) melalui pemerintahan yang bersih ( <i>Clean Government</i> ) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di BATAN	1	Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	10 ( sepuluh ) Unit Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK dari target sebanyak 2 Unit Kerja	5 ( lima ) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK dari target sebanyak 3 unit kerja.
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN	100 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal dari target minimal 85%	100 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal dari target minimal 90%
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 7,69% dari target maskimal 15%	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5,38% dari target maksimal 10%

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 16 dari 36

### 3.2.1 Pencapaian tujuan dan sasaran

#### Rata - rata Capaian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Memberikan pelayanan prima secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja optimal	Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) melalui pemerintahan yang bersih ( <i>Clean Government</i> ) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) di BATAN	Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	3 Unit Kerja	5 Unit Kerja	167
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN	90%	100%	111,11%
		Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara	10%	5,38%	146,2%
Rata rata capaian kinerja					141,43%

Berdasarkan nilai rata - rata pencapaian kinerja sebesar 141,43%, maka pencapaian tujuan inspektorat yaitu Memberikan pelayanan prima secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja optimal dapat dikatakan tercapai dengan baik.

### 3.2.2 Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama.

#### 3.2.2.1 Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN.

**Anggaran : Rp. 466.000.000,-**

**Realisasi : Rp. 465.047.220,-**

Inspektorat BATAN selaku institusi yang bergerak pada ranah pengawasan, terpanggil untuk memulai suatu gerakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* khususnya di lingkup BATAN salah satunya dengan penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada suatu unit kerja. Kriteria WBK pada suatu unit kerja adalah tingkat kejadian korupsi, tanpa

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 17 dari 36

mengabaikan atribut lainnya seperti pelaksanaan tugas pokok, disiplin dan tertib kepegawaian. Kriteria tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pendeklarasian status suatu unit kerja di lingkup BATAN sebagai wilayah bebas dari korupsi. Gagasan ini muncul sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Bahan penilaian utama untuk menetapkan status suatu unit kerja sebagai WBK bersumber dari hasil pengawasan, baik dari Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal. Pada institusi Inspektorat sendiri melekat suatu tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup BATAN, yang turut serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan program/kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir di Indonesia. Penetapan status suatu unit kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi merupakan cerminan dalam pelaksanaan tupoksi, dan kemampuan unit kerja yang bersangkutan dalam menciptakan statusnya sebagai wilayah bebas dari korupsi.

Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2012 realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target pada tahun 2012 sebanyak 3 Unit Kerja sedangkan Realisasi yang dicapai sebanyak 5 Unit Kerja. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai Inspektorat serta Tim Penggerak WBK melalui beberapa proses kegiatan dari penyusunan pedoman, penilaian, sosialisasi hingga pada akhirnya dapat ditetapkan Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Unit Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2012 adalah :

1. Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri ( PTNBR )
2. Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir ( PTBN )
3. Pusat Pengembangan Informatika Nuklir ( PPIN )
4. Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir ( PKTN )
5. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir ( STTN )

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 18 dari 36

Indikator	Realisasi tahun 2011	Realisasi tahun 2012
Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	10 ( sepuluh ) Unit Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK dari target sebanyak 2 Unit Kerja	5 ( lima ) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK dari target sebanyak 3 unit kerja.

Berdasarkan data tersebut, prosentase capaian kegiatan WBK disimpulkan sebesar 167%.

**Kesimpulan :**

Target tahun 2012 : 3 ( tiga ) Unit Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK.

Realisasi tahun 2012 : 167% / 5 ( lima ) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK.

**3.2.2.2 Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN.**

**Anggaran : Rp. 199.000.000,-**

**Realisasi : Rp. 198.744.950,-**

Kegiatan evaluasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan tindak lanjut serta penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pemerintah terhadap temuan BPK adalah sama - sama melakukan kegiatan untuk memberikan jawaban atau penyelesaian tentang tindak lanjut temuan atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan yang membedakan adalah pelaksanaan tindak lanjut, baik dalam form pengisian maupun dalam laporan hasil pemeriksaan (eksternal dan internal).

Tahapan evaluasi tindak lanjut , rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut, pencapaian sarannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan, selain disebut seperti diatas tahapan pencapaian sasaran rencana tindak ditambah dengan membentuk Tim Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 19 dari 36

Tujuan kegiatan ini adalah agar tidak ditemukannya lagi temuan yang sejenis pada saat dilakukan pemeriksaan dan memberikan jawaban atas temuan BPK dalam laporan keuangan BATAN secara komprehensif dan tepat waktu.

Sasaran kegiatan untuk tahun 2012 adalah terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut temuan Inspektorat sesuai PKPT dan di luar PKPT dan terlaksananya evaluasi tindak lanjut temuan BPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua temuan yang terdapat dalam LHP Inspektorat dan LHP BPK telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Inspektorat maupun BPK.

Dari 93 temuan eksternal maupun internal yang terdapat pada tahun 2012 telah ditindaklanjuti seluruhnya. Dengan demikian capaian prosentase tindak lanjut rekomendasi temuan internal dan eksternal sebesar 100%. Capaian tersebut telah melampaui target yang direncanakan minimal sebesar 90%.

Indikator	Realisasi tahun 2011	Realisasi tahun 2012
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN	100 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal dari target minimal 85%	100 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal dari target minimal 90%

### **Kesimpulan :**

Secara umum tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal dapat tercapai 100%, dituangkan dalam 1 bentuk laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Target tahun 2012 : 90 % penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN.

Realisasi tahun 2012 : 100% penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 20 dari 36

### 3.2.2.3 Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.

**Anggaran : Rp. 464.115.000,-**

**Realisasi : Rp. 463.442.300,-**

Sampai saat ini korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia masih menjadi masalah utama yang belum teratasi secara tuntas. Hal ini sering menjadi sorotan berbagai lembaga internasional bahwa praktek KKN di Indonesia masih berada pada peringkat atas. Masalah ini bahkan telah memasuki ruang lingkup instansi pemerintah, tentu saja hal ini sangatlah meresahkan mengingat tugas pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan mengganggu moral sekaligus kinerja aparat pemerintahan serta menjadi tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Jenis temuan pemeriksaan yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Kasus yang merugikan negara
2. Kewajiban menyetor kepada negara
3. Pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan
4. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan
5. Penyimpangan dari ketentuan anggaran.
6. Hambatan terhadap kelancaran proyek
7. Hambatan terhadap tugas pokok
8. Kelemahan administrasi
9. Ketidاكلancaran pelayanan kepada masyarakat
10. Temuan pemeriksaan lainnya

Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara, target inspektorat maksimal sebesar 10%, realisasi tahun 2012 sebesar 5,38%. Prosentase tersebut diperoleh dari jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebanyak 5 temuan dari total 93 temuan yang merupakan jumlah kumulatif temuan BPK dengan jumlah temuan inspektorat. Target inspektorat maksimal hanya 10% dan realisasinya hanya 5,38% jadi masih lebih baik daripada target 10%.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 21 dari 36

Indikator	Realisasi tahun 2011	Realisasi tahun 2012
Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 7,69% dari target maksimal 15%	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5,38% dari target maksimal 10%

### **Kesimpulan:**

Target sasaran Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 10 % dapat tercapai 100%

Target tahun 2012 : 10 % persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.

Realisasi tahun 2012 : 146,2% ( 5,38 % jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara ).

#### **3.2.2.4 Jumlah Dokumen audit kinerja terhadap unit kerja di BATAN.**

**Anggaran : Rp. 370.115.000,-**

**Realisasi : Rp. 370.103.400,-**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor: 392/KA/XI/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN, Inspektorat melaksanakan audit dengan tujuan untuk menilai atas pelaksanaan tugas dan fungsi, yang mencakup penilaian kecukupan pengendalian manajemen, kecukupan prosedur, keekonomisan, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber dana dan daya serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala kebijakan dan prosedurnya. Secara rinci tujuan audit Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Menilai kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas dan fungsi telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- b. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan mengukur efektivitas pelaksanaan program;
- c. Menilai keekonomisan, efisiensi, dan efektifitas penggunaan sumber dana dan daya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 22 dari 36

d. Menilai kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur dan arahan pimpinan.

Lingkup pemeriksaan meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi beserta aspek penunjangnya yaitu aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, dan aspek metode kerja. Audit ini dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dengan prosedur lain yang kami anggap perlu sesuai dengan keadaan yang ditemui di lapangan.

Pada tahun 2012, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan PKPT yang telah direncanakan yaitu sebanyak 20 unit kerja dengan penerbitan LHA sebanyak 21 dokumen LHA ( 10 LHA PKPT tahun 2011 dan 11 LHA PKPT tahun 2012 ) sisanya sedang dalam proses penyusunan.

Indikator	Realisasi tahun 2011	Realisasi tahun 2012
Jumlah dokumen audit kinerja	20 Unit Kerja	20 Unit kerja

#### **Kesimpulan :**

Secara umum pelaksanaan audit kinerja terlaksana 20 unit kerja dengan capaian 100% , dituangkan dalam bentuk 11 laporan hasil audit kinerja dan Sisa 9 laporan sedang dalam proses penyusunan LHA.

Target tahun 2012 : 20 Pelaksanaan Audit Kinerja

Realisasi tahun 2012 : 20 Pelaksanaan Audit Kinerja

#### **3.2.2.5 Jumlah Dokumen evaluasi kinerja dan dokumen reuiu Laporan Keuangan unit kerja di BATAN.**

**Anggaran : Rp. 94.000.000,-**

**Realisasi : Rp. 93.338.900,-**

- Evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat difokuskan pada evaluasi dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Evaluasi LAKIP merupakan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 23 dari 36

pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja di BATAN.

Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Pada tahun 2012 Inspektorat bersinergi dengan Biro Perencanaan telah melakukan evaluasi LAKIP terhadap 24 unit kerja di BATAN dengan hasil sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Nilai</b>
1	Pusat Teknologi Limbah Radioaktif ( PTLR )	79,54
2	Pusat Reaktor Serba Guna ( PRSG )	91,79
3	Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka ( PRR )	77,86
4	Pusat Pengembangan Energi Nuklir ( PPEN )	79,29
5	Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi ( PATIR )	89,29
6	Biro Kerjasama Hukum dan Humas ( BKHH )	76,08
7	Biro Umum ( BU )	91,17
8	Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir ( PKTN )	92,83
9	Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir ( PTBIN )	80,35
10	Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir ( PTBN )	81,30
11	Pusat Teknologi Kemitraan dan Meteorologi Radiasi ( PTKMR )	88,25

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 24 dari 36

12	Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir ( STTN )	90,96
13	Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir ( PTRKN )	81,74
14	Pusat Pendidikan dan Pelatihan ( PUSDIKLAT )	79,54
15	Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan ( PTAPB )	81,96
16	Pusat Pengembangan Informatika Nuklir ( PPIN )	67,50
17	Pusat Pengembangan Geologi Nuklir ( PPGN )	86,03
18	Biro Perencanaan ( BP )	93,12
19	INSPEKTORAT	90,12
20	Biro Sumber Daya Manusia ( BSDM )	88,38
21	Pusat Diseminasi Iptek Nuklir ( PDIN )	88,79
22	Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir ( PRPN )	87,88
23	Pusat Jaminan Mutu Nuklir ( PSJMN )	85,88
24	Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri ( PTNBR )	89,93

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut terdapat peningkatan nilai yang diperoleh oleh masing masing Unit Kerja jika dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan penyusunan LAKIP yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat sebagai evaluator tercapai dengan baik.

Pada Tahun 2012 hasil evaluasi LAKIP 2011 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional termasuk salah satu diantara 17 Kementerian dan Lembaga (K/L) meraih predikat “B” (baik) dengan nilai 67,77 dari 82 K/L. Nilai tersebut merupakan cerminan tingkat akuntabilitas kinerja BATAN terhadap kinerja yang telah dicapai.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 25 dari 36

Perkembangan Hasil Evaluasi Atas LAKIP BATAN yang dievaluasi oleh  
Kementerian PAN dan RB:

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI LAKIP 2010	NILAI LAKIP 2011
a.	Perencanaan Kinerja	35	24,47	24,16
b.	Pengukuran Kinerja	20	13,57	14,70
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,50	11,33
d.	Evaluasi Kinerja	10	5,59	6,42
e.	Capaian kinerja	20	8,59	11,17
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>64,07</b>	<b>67,77</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>	<b>B</b>

- Tahapan reuiu laporan keuangan meliputi perencanaan reuiu, pelaksanaan reuiu, dan pelaporan reuiu. Tahap perencanaan reuiu pada pokoknya meliputi kegiatan untuk meyeleksi dan menentukan objek reuiu, proses penyelenggaraan akuntansi dan akun LK K/L yang akan direuiu, dan pemilihan langkah – langkah reuiu. Tahap pelaksanaan reuiu mencakup kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK K/L pada unit reuiu, serta penyusunan Kertas Kerja Reuiu. Tahap pelaporan reuiu mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reuiu, Ikhtisar hasil Reuiu, dan laporan hasil Reuiu, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA dengan tingkat UAPA.

Pada tahun 2012, Inspektorat telah melaksanakan 2 kali reuiu yaitu reuiu laporan keuangan tahun 2012 dan reuiu laporan keuangan semester 1 tahun 2012.

Indikator	Realisasi tahun 2011	Realisasi tahun 2012
Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan reuiu laporan keuangan	1 laporan hasil evaluasi 2 laporan hasil reuiu laporan keuangan	1 laporan hasil evaluasi 2 laporan hasil reuiu laporan keuangan

**Kesimpulan :**

Secara umum evaluasi kinerja dan reuiu laporan keuangan dapat tercapai 100%, dituangkan dalam bentuk 1 laporan hasil evaluasi dan 2 laporan hasil reuiu.

Target tahun 2012 : 3 Laporan

Realisasi tahun 2012 : 3 Laporan

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 26 dari 36

### 3.2.2.6 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

**Anggaran : Rp. 46.600.000,-**

**Realisasi : Rp. 46.586.100,-**

Setiap unit kerja BATAN dituntut untuk mampu mengelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pimpinan unit kerja wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana penerapan SPI di unit kerja BATAN maka dipandang perlu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penerapan unsur SPIP. Tahapan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP di BATAN adalah melakukan persiapan yang dimulai dari penyusunan rencana kerja, pembentukan Tim Monev dan instrumen penilaian berupa Daftar Uji. Setelah itu melakukan kegiatan evaluasi dan penilaian terhadap 5 unsur SPIP yang meliputi : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan selanjutnya melaporkan hasil Monev.

Tujuan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP di BATAN adalah untuk mengetahui kesesuaian/konsistensi capaian penerapan penilaian SPI pada unit kerja di BATAN. Monev hasil penilaian penerapan SPI diharapkan dapat berfungsi sebagai tindakan korektif terhadap penerapan unsur SPI sehingga penerapan SPI di BATAN dapat terlaksana sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman yang ada.

#### **Kesimpulan :**

Realisasi tahun 2012 : telah tersusunnya pedoman SPIP di BATAN dapat tercapai 100%.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 27 dari 36

### 3.2.3 Pencapaian Indikator Kinerja s/d Tahun Berjalan dengan rencana 5 tahun.

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target s/d 2014	Target s/d 2012	Realisasi s/d tahun 2012	%
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	24 Unit kerja	6 Unit Kerja	15 Unit Kerja	71.4%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN	100%	90%	100%	100%
	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	0%	10%	5,38%	100%

Penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Pencapaian jumlah Unit Kerja yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi sebesar 71,4% yaitu sampai dengan tahun 2012 telah tercapai 15 unit kerja dari target 24 unit Kerja pada akhir tahun 2014, sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2012 telah sesuai bahkan melebihi target.
- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN pada umumnya sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 tercapai 100% dalam artian temuan internal dan eksternal telah ditindaklanjuti seluruhnya, sehingga capaian kinerja juga sesuai dan melebihi target.
- Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara pada tahun 2012 berada dibawah maksimum target yang ditetapkan, yaitu sebesar 5,38% dari target maksimal 10%, sehingga capaian kinerja telah sesuai dan sesuai target yang ditetapkan.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 28 dari 36

### 3.2.4 Pencapaian Kinerja Lainnya

#### 3.2.4.1 Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan.

**Anggaran : Rp. 370.115.000,-**

**Realisasi : Rp. 370.103.400,-**

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Inspektorat pada tahun 2011 mencakup audit operasional, pemeriksaan kinerja ( Lakip ) dan reviu laporan dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Realisasi pemeriksaan sesuai dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) Tahun 2012 sampai dengan Triwulan IV terdiri dari :

a. Sesuai PKPT sebanyak 20 (duapuluh) obyek pemeriksaan.

OBYEK PEMERIKSAAN		RENCANA	REALISASI
1	Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.	Maret	6 Maret 2012
2	Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir.	Maret	6 Maret 2012
3	Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir.	Pebruari	13 Maret 2012
4	Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir.	Pebruari	13 Maret 2012
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	April	2 Mei 2012
6	Pusat Diseminasi Iptek Nuklir	Juli	2 Mei 2012
7	Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi	April	9 Mei 2012
8	Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka	Mei	9 Mei 2012
9	Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir	Agustus	1 Agustus 2012
10	Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir	Mei	6 Agustus 2012
11	Pusat Reaktor Serba Guna	Juli	6 Agustus 2012
12	Pusat Pengembangan Informatika Nuklir	Juni	13 Agustus 2012
13	Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir	Oktober	1 Oktober 2012
14	Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan	Oktober	1 Oktober 2012
15	Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri	Oktober	8 Oktober 2012
16	Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir	Juni	7 Nopember 2012
17	Pusat Pengembangan Geologi Nuklir	Agustus	7 Nopember 2012

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 29 dari 36

18	Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	Nopember	11 Nopember 2012
19	Pusat Pengembangan Energi Nuklir	September	26 Desember 2012
20	Kantor Pusat BATAN	Nopember	26 Desember 2012

b. Di luar PKPT : sebanyak 3 (tiga) obyek pemeriksaan.

- 1). Reviu Laporan Keuangan BATAN Tahun 2011, tanggal 17 Januari 2012.
- 2). Reviu Laporan Keuangan BATAN Semester I Tahun 2012, 24 Juli 2012
- 3). Evaluasi LAKIP (24 Unit Kerja), bulan Juli s.d. September 2012

## 2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan sampai dengan Triwulan IV terdiri dari :

a. Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai PKPT sebanyak 11 (sebelas) laporan.

OBYEK PEMERIKSAAN		NOMOR & TGL. LHP
1	Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir.	001/ISP.D/V/2012, 24 Mei 2012
2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	002/ISP.D/VII/2012,17 Juli 2012
3	Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir.	004/ISP.B/VII/2012,27 Juli 2012
4	Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir.	005/ISP.C/IX/2012,21 September 2012
5	Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.	006/ISP.A/IX/2012,24 September 2012
6	Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan	007/ISP.A/X/2012,22 Oktober 2012
7	Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir	008/ISP.D/X/2012,23 Oktober 2012
8	Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri	009/ISP.C/X/2012,29 Oktober 2012
9	Pusat Pengembangan Informatika Nuklir	010/ISP.D/XI/2012,30 November 2012
10	Pusat Diseminasi Iptek Nuklir	011/ISP.B/XI/2012,30 November 2012
11	Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir	012/ISP.C/XII/2012,10 Desember 2012

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 30 dari 36

- b. Laporan Hasil Pemeriksaan di luar PKPT sebanyak 2 (dua) laporan.
1. Reviu Laporan Keuangan BATAN Tahun 2011 No. R-78/WP.00/ISP.2/2012, tanggal 27 Januari 2012.
  2. Ikhtisar Hasil Evaluasi LAKIP Unit Kerja Tahun 2011 No. 350/WP.00/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan PKPT Tahun lalu (tahun 2011) sebanyak 10 (sepuluh) laporan.

OBYEK PEMERIKSAAN		NOMOR & TGL. LHP
1	Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir	012/ISP.A/XII/2011,30 Desember 2011
2	Pusat Reaktor Serba Guna	013/ISP.D/I/2012,26 Januari 2012
3	Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	014/ISP.C/I/2012,27 Januari 2012
4	Pusat Pengembangan Informatika Nuklir	015/ISP.C/I/2012,30 Januari 2012
5	Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka	016/ISP.B/II/2012,29 Pebruari 2012
6	Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir	017/ISP.B/III/2012,27 Maret 2012
7	Pusat Pengembangan Galian Nuklir	018/ISP.B/IV/2012,30 April 2012
8.	Pusat Pengembangan Energi Nuklir	003/ISP.A/VII/2012,17 Juli 2012
9.	Kantor Pusat BATAN	019/ISP.C/VII/2012,25 Juli 2012
10.	Inspektorat	020/ISP.A/XI/2012,25 Nopember 2012

### 3. Jumlah Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut.

- a. Hasil Temuan dari Inspektorat BATAN sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2012. Dari 21 (dua puluh satu) Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai PKPT dan PKPT tahun lalu yang diterbitkan diperoleh temuan pemeriksaan sejumlah 71 (tujuh puluh satu) buah.

KODE	JENIS TEMUAN PEMERIKSAAN	JUMLAH	TPL	TPB
01	Kasus yang merugikan negara.	0	0	0

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 31 dari 36

02	Kewajiban menyetor kepada negara.	2	2	0
03	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	9	9	0
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.	8	8	0
05	Penyimpangan dari ketentuan anggaran.	16	16	0
06	Hambatan terhadap kelancaran proyek.	0	0	0
07	Hambatan terhadap tugas pokok.	2	2	0
08	Kelemahan administrasi.	30	30	0
09	Ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat.	0	0	0
10	Temuan pemeriksaan lainnya.	4	4	0
<b>JUMLAH</b>		<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>

- b. Tindak lanjut saldo temuan hasil pemeriksaan Inspektorat tahun yang lalu (tahun 2011).

KODE	JENIS TEMUAN PEMERIKSAAN	JUMLAH	TPL	TPB
01	Kasus yang merugikan negara.	0	0	0
02	Kewajiban menyetor kepada negara.	0	0	0
03	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0	0	0
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.	0	0	0
05	Penyimpangan dari ketentuan anggaran.	0	0	0
06	Hambatan terhadap kelancaran proyek.	0	0	0
07	Hambatan terhadap tugas pokok.	0	0	0

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 32 dari 36

08	Kelemahan administrasi.	0	0	0
09	Ketidak lancarn pelayanan kepada masyarakat.	0	0	0
10	Temuan pemeriksaan lainnya.	0	0	0
JUMLAH		0	0	0

c. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Instansi Luar.

KODE	JENIS TEMUAN PEMERIKSAAN	BPK			BPKP		
		TEMUAN	TPL	TPB	TEMUAN	TPL	TPB
01	Kasus yang merugikan negara.	0	0	0	0	0	0
02	Kewajiban menyetor kepada negara.	3	3	0	0	0	0
03	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	1	0	0	0	0
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.	4	4	0	0	0	0
05	Penyimpangan dari ketentuan anggaran.	0	0	0	0	0	0
06	Hambatan terhadap kelancaran proyek.	0	0	0	0	0	0
07	Hambatan terhadap tugas pokok.	1	1	0	0	0	0
08	Kelemahan administrasi.	3	3	0	0	0	0
09	Ketidak lancarn pelayanan kepada masyarakat.	0	0	0	0	0	0
10	Temuan pemeriksaan lainnya.	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		12	12	0	0	0	0

Keterangan :

- TPL = Temuan Pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti.
- TPB = Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 33 dari 36

### 3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, yaitu meningkatkan kinerja manajemen kelembagaan litbang menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan indikator kinerja keuangan dalam opini WTP dan LAKIP dengan predikat baik, BATAN telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap semester Inspektorat bersama Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro Umum melakukan reuiu laporan keuangan satker dengan cara pendampingan penyusunan laporan keuangan terhadap seluruh satker di BATAN (21 Satker).
2. Setiap tahun Inspektorat bersama Bagian Evaluasi Program, Biro Perencanaan melakukan evaluasi lakip terhadap seluruh unit kerja di BATAN (24 Unit Kerja).
3. Setiap tahun Inspektorat melakukan audit kinerja terhadap 21 satker di BATAN dengan target menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara.

Selain dari 3 (tiga) kegiatan tersebut diatas, setiap tahun Inspektorat bersama Tim Penggerak WBK melakukan penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terhadap 5 unit kerja. Realisasi s.d. Tahun 2012, 15 Unit Kerja telah memperoleh predikat WBK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BATAN (ditargetkan pada tahun 2014 seluruh unit kerja di BATAN telah memperoleh predikat WBK).

WBK adalah unit kerja setingkat Eselon II di BATAN yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pembentukan WBK merupakan salah satu dari 11 Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. WBK ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria kinerja dan kriteria pengelolaan keuangan dengan periode waktu penilaian satu tahun terakhir. Pedoman penetapan WBK di BATAN dapat dilihat di website Inspektorat Kepala BATAN.

- Pencapaian sasaran Inspektorat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2012 realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target pada tahun 2012 sebanyak 3 Unit Kerja sedangkan Realisasi yang dicapai sebanyak 5 Unit Kerja. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai Inspektorat serta Tim Penggerak WBK setelah melalui beberapa proses kegiatan dari penyusunan pedoman, penilaian, sosialisasi, uji coba,

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 34 dari 36

hingga pada akhirnya dapat ditetapkan Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Terdapat penurunan realisasi Unit Kerja yang berpredikat WBK jika dibandingkan antara capaian tahun 2011 sebanyak 10 unit kerja ( dari target sejumlah 2 unit kerja ) dibandingkan dengan tahun 2012 hanya 5 unit kerja, kondisi ini disebabkan karena banyaknya intensitas kegiatan yang perlu dilaksanakan pada tahun 2012. Namun capaian 5 unit Kerja yang berpredikat WBK masih berada diatas target Renstra, IKU dan PK Inspektorat untuk tahun 2012 yaitu sejumlah 3 unit kerja.

- b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal ( BPK, BPKP ) dan internal BATAN pada tahun 2011 targetnya sebesar 90% realisasi yang dicapai sebesar 100% .
  - c. Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara, target inspektorat maksimal sebesar 10%, realisasi tahun 2012 sebesar 5,38%. Prosentase tersebut diperoleh dari jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebanyak 5 temuan dari total 93 temuan yang merupakan jumlah kumulatif temuan BPK dengan jumlah temuan inspektorat. Target inspektorat maksimal 10% dan realisasinya hanya 5,38% jadi realisasi yang diperoleh masih lebih baik daripada target 10%.
- Proses pengawasan yang telah diimplementasikan selama tahun 2012 akan dipertahankan agar tetap sesuai dengan standar Jaminan Mutu yang telah dicapai pada tahun 2010.
  - Pada tahun 2012 Inspektorat telah menyelesaikan penyusunan pedoman SPIP BATAN yang diharapkan dapat dijadikan panduan dalam penerapan SPIP di seluruh Satuan Kerja di BATAN.

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 35 dari 36

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012

Inspektorat BATAN untuk tahun 2012 memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 4.762.470.000,- milyar, Realisasi belanja Inspektorat tahun 2012 sebesar Rp 4.544.632.376,-, atau mencapai 95,43 % dari anggarannya. Secara umum realisasi anggaran yang mendukung sasaran Inspektorat pada tahun 2012 dijabarkan pada tabel berikut:

Sasaran/Kegiatan/Output	Anggaran				
	Pagu	Realisasi s/d ( Rp )			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
<b>Sasaran :</b>					
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN					
Evaluasi Laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan Inspektorat dan BPK	199.000.000	35.182.000	53.982.000	109.229.950	198.744.950
Penyempurnaan Sistem Informasi Pengawasan	98.000.000	14.900.000	37.131.900	54.321.900	97.591.900
Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004	202.090.000	33.700.000	54.035.000	152.522.000	201.367.950
Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi	263.910.000	31.967.000	79.740.870	140.560.270	263.679.270
Evaluasi LAKIP dan reuiu laporan keuangan	94.000.000	37.591.900	50.468.900	93.338.900	93.338.900
Pelaksanaan SPIP	46.600.000	1.306.950	40.706.250	44.395.150	46.586.100
Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan	370.115.000	64.269.350	93.777.600	244.165.550	370.103.400

	<b>INSPEKTORAT</b>  <b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	No. Dokumen : /OT.01.04/2013
		Tanggal : Januari 2013
		Revisi : 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012		Halaman : 36 dari 36

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Dokumen LAKIP Inspektorat tahun 2012 merupakan hasil evaluasi kinerja Inspektorat selama satu tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan dalam bidang pengawasan yang saling terkait untuk mencapai sasaran. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi suatu indikator positif yang sejalan dengan anggaran berbasis kinerja serta dapat memicu dan memacu kinerja Inspektorat untuk tahun yang akan datang.

Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas, serta dukungan pihak lain di luar Inspektorat yang turut serta menyumbang peranan atas keberhasilan kinerja sehingga sasaran dan tujuan Inspektorat pada Tahun 2012 dapat tercapai.